

Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam Mengelola Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil)

Implementation Policies Of Authority Allocation In Relation To The Management Of Mining Business License (A Case Study In Aceh Singkil District)

Nurdin

nurdinyunus@yahoo.co.id

Program Pascasarjana Universitas Terbuka
Graduate Studies Program Indonesia Open University

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan dampak dari implementasi kebijakan tersebut terhadap pengelolaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa dokumen tertulis, informasi lisan, dan gambar atau foto. Aspek yang diteliti adalah implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur; sedangkan dampak implementasi kebijakan yang diteliti adalah pengaruh internal pada instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Masalah yang dihadapi adalah kebijakan yang tumpang tindih dalam pembagian kewenangan (antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil) menyebabkan kebijakan tersebut sulit diimplementasikan dan diduga kurang memberikan dampak nyata bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini menunjukkan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah kewenangan desentralisasi kebijakan yang didisposisikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan dalam prakteknya berbagi kewenangan, Pemerintah Provinsi Aceh menjalankan kewenangan Dekonsentrasi yang didisposisikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh. Temuan lain yang terkait dengan pengelolaan izin usaha pertambangan adalah pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi Kota Subulussalam yang secara langsung berdampak pada pengurangan sumber daya aparatur dan aset daerah.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Kewenangan, Izin Usaha, Pertambangan.

ABSTRACT

This study aims at analyzing the implementation of authorization policies and its impact, in relation to managing the mining licences in Aceh Singkil. This study is qualitative, which produces outcomes such as descriptive data in the form of written documents, oral information, and images or photos. Data were gathered by interview, observation, and document review. The policies aspects which were studied were communication, resources, disposition, and structure. The study was focused on the internal impact within the Government of Aceh Singkil. The problem was that implementing the policy were overlapping between Central, Provincial and District Governments making it difficult to

implement the policies and had less of a substantial impact on the stakeholders. This study focused on the implementation of authorization policies as an impact, regarding the mining licences authorization in Aceh Singkil and did not discuss in detail about the policy itself. This study showed that the authorization of mining license was delegated by the government of Aceh Singkil to the Singkil District Sekretariat (Setdakab) and the Office of One Stop Licence Service (KP2TSP). While actually in exercising mining deconcentration authority the Aceh Provincial Government which authority was forwarded from the Ministry of Mines and Energy had delegated it to the Mining and Energy Office of the Aceh Province. Other findings related to the Government of Aceh Singkil was the proposal to create a new city of Subbulusalam within Aceh Singkil to improve services and reduce personnel and assets.

Keywords : *Public Policy, Public Administration, Authority, Business License, Mining.*

PENDAHULUAN

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 telah berhasil menciptakan iklim usaha yang cukup baik bagi kegiatan pertambangan di Indonesia serta berhasil menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Sigit, 2004). Peluang pemberian kontrak publik kepada Perusahaan Swasta (investor) awalnya didahului oleh Izin Publik dari Menteri ESDM, dapat dilaksanakan bila Instansi Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri, maka Menteri dapat memberikan izin untuk dilakukan kontrak dengan pihak lain. Termasuk untuk bahan galian Golongan C, bila terdapat di lepas pantai dan diusahakan oleh Perusahaan Asing, maka dilakukan dengan bentuk kontrak karya.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara masih menjadi perdebatan antara berbagai pihak terkait, didalamnya mengatur kewenangan perizinan yang diklasifikasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Daerah, baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Pengusahaan pertambangan tidak lagi diklasifikasi berdasarkan jenis bahan galian tambangnya, seperti yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, tetapi pemberian izin usaha didasarkan pada kewenangan daerah otonom masing-masing. Hal ini menurut Nugraha (2005), kurang tepat karena tidak mungkin dilakukan klasifikasi usaha pertambangan berdasarkan prinsip otonomi daerah, dalam arti dihubungkan dengan pembagian wilayah. Klasifikasi usaha pertambangan lebih tepat dilakukan berdasarkan sebaran bahan galian. Menanggapi fakta tersebut diatas, Hikmahanto (2012) menyarankan jika pemerintah benar-benar ingin menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara harus direvisi.

Pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya mineral antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Qanun Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi Dan Gas Alam berupa penyusunan data dan informasi usaha pertambangan, pemberian izin usaha pertambangan, melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengangkatan dan pembinaan inspektur serta fungsional tambang di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh dalam mengelola setiap Ijin Usaha Pertambangan pada tahap Penyelidikan Umum ke Penyelidikan Eskplorasi harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi Pemerintah Aceh (Gubernur) untuk menetapkan wilayah usaha pertambangan.

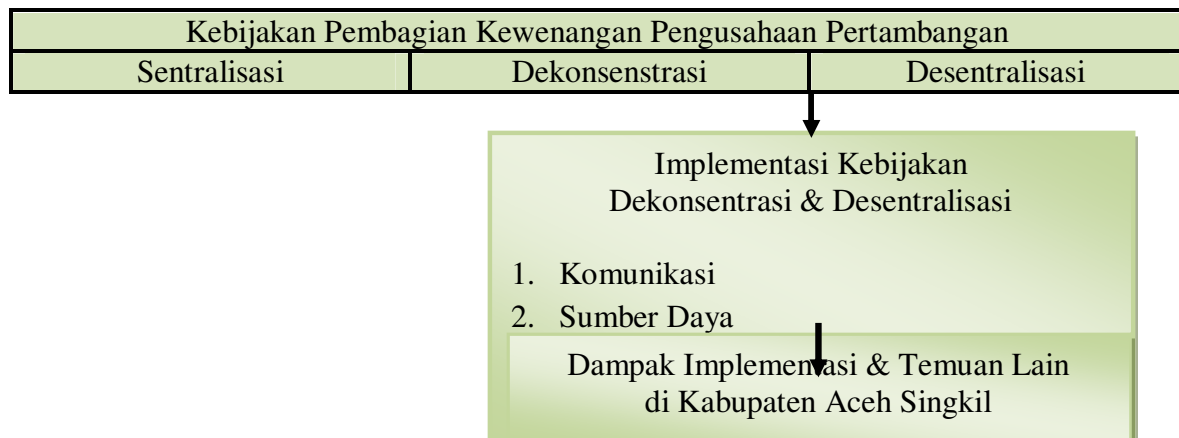
Kabupaten Aceh Singkil, seperti yang tertera pada Lampiran 1, memiliki potensi pertambangan pasir kuarsa dan gambut yang termasuk galian Golongan C. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendapat pembagian kewenangan secara penuh untuk mengelola Ijin Usaha Pertambangan hanya untuk usaha pertambangan galian golongan C, hal ini dinyatakan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 3: “untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital (golongan A dan B) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya, sedangkan untuk bahan galian non strategis dan vital (golongan C) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten”. Dari kewenangan tersebut di atas, maka diharapkan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dapat menjalankan kewenangannya dalam mengelola Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) agar berlangsung secara baik, transparan dan konsekuen, sehingga menjadi usaha andalan kedua setelah perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat tema dalam tugas akhir program ini adalah : Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam Mengelola Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil, dengan tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembagian kewenangan dan dampak kebijakan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil.

METODE

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam Mengelola Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil ini menggunakan metode penelitian kualitatif. “Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan (Moleong, 2002:5)

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas pengaruh implementasi dan dampak kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola izin usaha pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil. Analisis keberhasilan implementasi pembagian kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil analisisnya sangat sesuai memakai teori yang disampaikan oleh Edwar III (1980) berupa Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Sedang analisa dampak dari implementasi tersebut menurut pendapat Salim (2004) yang harus diperhitungkan akan digunakan sebagai acuan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada temuan lain. Sehingga alur penelitian seperti diagram berikut:



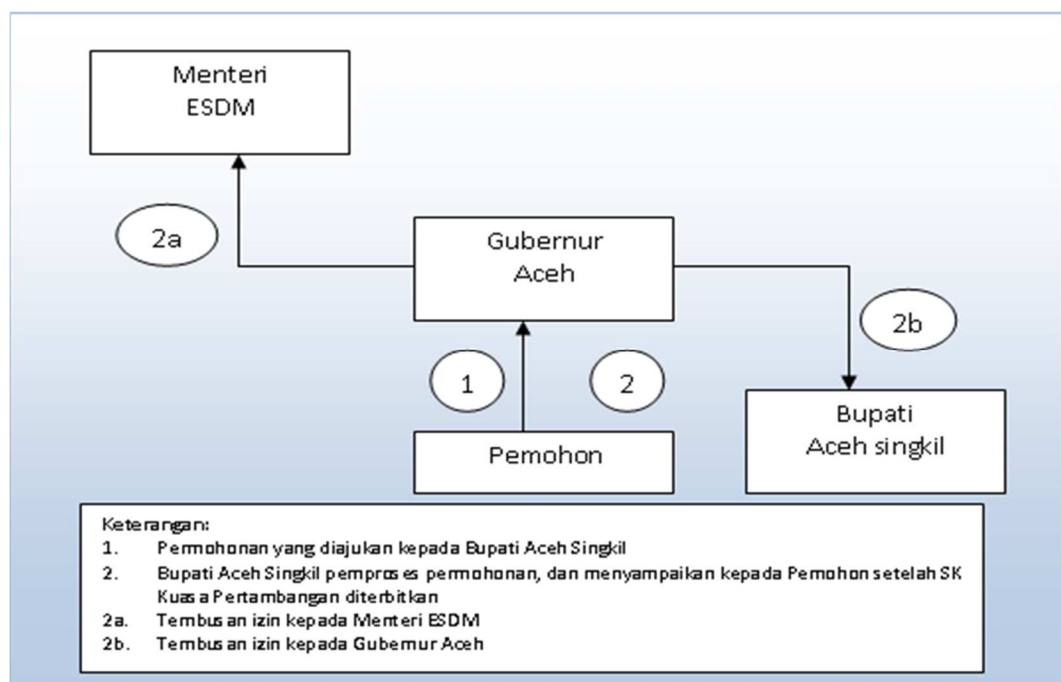
HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagai pengganti dari UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, ketiga undang-undang ini akan berpengaruh besar terhadap pembagian kewenangan yang dijabarkan dalam implementasi dan berdampak pada tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

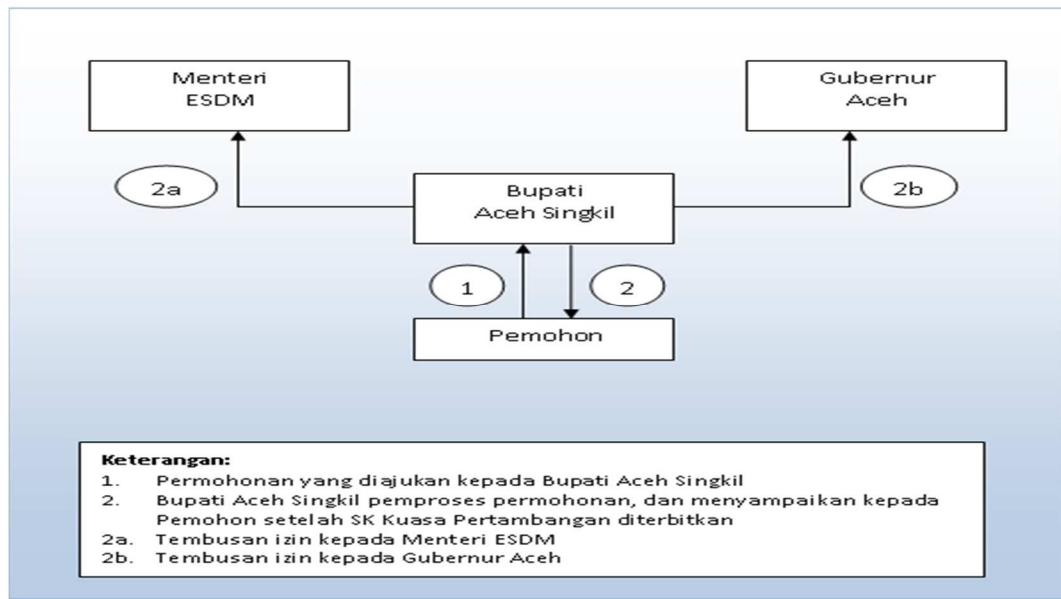
Khusus pengelolaan pada bidang pertambangan, isu-isu yang mewarnai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh antara lain isu demokratisasi, tata pemerintahan yang baik (*good governance*), bebas KKN, HAM, kelangsungan bumi dan lingkungan, tuntutan atas manfaat pertambangan yang lebih besar, nilai tambah pertambangan yang minim, penambangan tanpa izin, pencabutan izin, praktek otonomi daerah, pengembangan masyarakat, infrastruktur dan disharmoni kebijakan antara lahan kehutanan dan perkebunan.

Seperti yang dikemukakan Edward III (1980:9-10), ada 4 variabel penentu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif. Keempat variabel tersebut secara simultan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan implementasi kebijakan.

- (1) Arifin (2005:5) mengemukakan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Berikut ini adalah diagram alur alur komunikasi proses perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur Aceh :



Sedangkan komunikasi kebijakan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan yang menjadi kewenangan Bupati Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terlihat pada diagram alur dibawah ini :



- (2) Variabel Sumber daya manusia dalam proses perizinan merupakan aktor yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Teguh Sulistiyan dan Rosidah (2003:9) sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi fisik dan non fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang terakumulasi pada seseorang pegawai, sedangkan potensi non fisik adalah kemampuan seseorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, intelegensi, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Efektifitas implementasi dekonsentrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Berdasarkan analisis jabatan, berikut ini adalah sumber daya manusia yang mengisi jabatan pada Distamben Aceh, yaitu: (1) Kepala Dinas; (2) Wakil Kepala Dinas; (3) Kepala Bagian Tata Usaha; (4) Kepala Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program; (5) Kepala Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral; (6) Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan; (7) Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan; (8) Kepala Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengembangan Energi; (9) Kepala Sub Dinas Hidrogeologi dan Geologi Tata Lingkungan; (10) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan (11) Kelompok Jabatan Fungsional. eksploitasi bahan galian. Variabel sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Distamben Aceh terutama Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan merupakan alat pendukung dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam menunjang atau membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana pada suatu organisasi, maka setiap kegiatan yang dijalankan oleh para pekerja akan lebih mudah dan cepat. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Dalam rangka menjalankan kewenangan desentralisasi di Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil memiliki Peraturan Daerah berupa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Tidak seperti Provinsi Aceh yang memiliki dinas khusus yang mengelola penguasaan pertambangan, Kabupaten Aceh Singkil tidak memiliki dinas pertambangan. Namun dalam pengelolaan izin usaha pertambangan dikelola oleh Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil ruang lingkup kerja Asisten

Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Bagian Ekonomi Sub Bagian Inventarisasi, Penanaman Modal dan Perizinan. Dengan kata lain Perizinan perusahaan pertambangan golongan A dan B di Kabupaten Aceh Singkil dikelola oleh Sub Bagian Inventarisasi, Penanaman Modal dan Perizinan.

Dalam hal pengelolaan perizinan pertambangan golongan C dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP). Berdasarkan analisis jabatan, berikut ini adalah sumber daya manusia yang mengisi jabatan pada KP2TSP, yaitu (1) Kepala Kantor, (2) Sub Bagian Tata usaha, (3) Seksi Perencanaan, Pengembangan, Pelaporan dan Evaluasi, (4) Seksi Pelayanan, (5) Seksi Informasi dan Pengaduan, (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Variabel kewenangan, menurut Swastha (2000:114), wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sementara itu Henry Fayol (dalam Agus Sabardi, 1997: 106) menyebutkan wewenang sebagai kebenaran untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk memastikan ketaatan. Dengan demikian kewenangan berkaitan dengan hak atau kekuasaan untuk menjalankan kegiatan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam tugasnya mengelola perizinan itu, masing-masing pejabat di KP2TSP berwenang untuk:

1. Kepala Kantor, mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi, kepegawaian, keuangan, barang dan perlengkapan serta melakukan inventarisasi terhadap perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas mengelola keuangan, urusan kepegawaian, melaksanakan kegiatan umum dan ketatausahaan.
3. Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Pelaporan dan Evaluasi, mempunyai tugas merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana, dan menyiapkan bahan atau data untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan publik.
4. Kepala Seksi Pelayanan, mempunyai tugas memberikan pelayanan berupa: menerima berkas, memproses dan menyiapkan berkas untuk ditanda tangani serta menyimpan berkas.
5. Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan, mempunyai tugas memberikan informasi dan menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perizinan Terpadu
6. Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi KP2TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Variabel sarana dan prasarana yang diperlukan oleh KP2TSP merupakan alat pendukung dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam menunjang atau membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana pada suatu organisasi, maka setiap kegiatan yang dijalankan oleh para pekerja akan lebih mudah dan cepat. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

- (3) Variabel disposisi dalam pelaksanaan tata kerja kedinasan Dinas Pertambangan Provinsi Aceh, dimana Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas diwajibkan, antara lain:
 - a) Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugas masing-masing mengelola sumber daya energi non migas kecuali bahan radio aktif;

- b) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.
- c) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan,
- d) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- f) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara satuan organisasi mempunyai hubungan kerja

Variabel disposisi dalam pelaksanaan tata kerja kedinasan KP2TSP, dimana Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara transparan dan akuntabel baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan instansi lain di luar Pemerintah Aceh Singkil sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dalam hal perizinan pertambangan berkoordinasi dengan Sub Bagian Inventarisasi Penanaman Modal dan Perizinan Bagian Perekonomian Setdakab Aceh singkil.

- (4) Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dari para pelaksana kebijakan pengelolaan izin usaha pertambangan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan standar prosedur operasi (SOP) sesuai bagan/struktur organisasi kedinasan, baik Distamben Provinsi Aceh, Sektdakab maupun KP2TSP.

Proses Perizinan yang dikelola oleh Bagian Ekonomi Setdakab Aceh Singkil seperti PT Aneka Tambang Tbk (selanjutnya disebut PT. Antam pada tanggal 23 Oktober 2007 melalui Direktur Pengembangan Antam, telah menyampaikan Surat Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) yang memimpin Setdakab Kabupaten Aceh Singkil melakukan proses pengelolaan dengan sumberdaya yang ada (SDM, Informasi, Kewenangan, Sarana & Prasarana), melakukan komunikasi dengan Bupati Aceh Singkil dan mendisposisikan pengelolaannya kepada Asisten II (Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat) untuk di proses di Bagian Ekonomi di Sub Bagian Inventarisasi, Penanaman Modal dan Perizinan. Setelah berproses selama 1 (satu) minggu, pada tanggal 1 November 2007, Bupati Aceh Singkil mengabulkan permohonan Antam dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, dengan pokok-pokok informasi sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan surat dari Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk Nomor : 4651/2012/PAT/2007 tanggal 23 Oktober 2007 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
2. Rekomendasi ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan.
3. Apabila pekerjaan Penyelidikan Umum ini tidak selesai dalam jangka waktu yang diberikan, maka rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tidak hanya rekomendasi, Bupati Aceh Singkil mempertegas permohonan Antam untuk melakukan penyelidikan umum, dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.4.5/82b/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT Antam Tbk pada tanggal 5 Nopember 2007, dengan pokok-pokok ketetapan sebagai berikut :

No	Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT Aneka Tambang
1	<p>PERTAMA Memberikan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum Untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun</p> <p>Kepada : PT. ANTAM Tbk Alamat : Jl. TB.Simatupang, Lingkar Selatan Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530 Telp (62-21) 7891234 Fax.7891224.</p> <p>Atas suatu wilayah tertentu yang terletak di Kecamatan : Simpang Kanan dan Danau Paris Kabupaten : Aceh Singkil. Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam. Seluas : 6.617 Ha</p> <p>Titik Koordinat dan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.</p>
2	<p>KEDUA Pemegang Kuasa Pertambangan ini dalam melakukan Penyelidikan Umum Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya (DMP) harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>
3	<p>KETIGA Kuasa pertambangan ini dapat dibatalkan setiap saat apabila Pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini.</p>
4	<p>KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya</p>

Menanggapi fakta tersebut diatas, peneliti menginventarisir kebijakan Bupati Aceh Singkil berdasarkan kronologi historis dengan membandingkan kebijakan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, seperti pada Tabel berikut:

Nomor	Kebijakan	Sebelum	Sesudah
1	Tahapan Kegiatan	Tahap 1 KP Penyelidikan Umum	Sebelum dimulai KP Penyelidikan Umum, calon Pemegang KP di dahului memiliki Surat Keterangan Izin Penyelidikan

2	Masa Berlaku	1 tahun	Berlaku 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan apabila diperlukan
3	Persyaratan Rekomendasi Gubernur Aceh	Ada	Ada
4	Iuran Tetap	Besarnya tarif ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Hektar untuk pertambangan galian A dan B.	Tahap 1: Rp.10.000,00 per hektar / 6 bulan Tahap 2: Rp.15.000,00 per hektar / 6 bulan
5	Dibayarkan Melalui	Bendaharaan Umum Daerah (BUD)	DPKKD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah)
6	Laporan Kegiatan/ perkembangan	Setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan	sama
7	Pematokan batas wilayah	Selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan	Tidak ada atau Ditetapkan dalam Keputusan Bupati Aceh Singkil
8	Pembatalan Izin a. Tidak diusahakan selama 1 (satu) bulan sejak izin diberikan b. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan ini. c. Mengalihkan Kuasa Pertambangan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Aceh Singkil.		Pasal 33: Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan oleh Bupati Aceh Singkil walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila Pemegang KP tidak dapat memenuhi kewajiban dalam Keputusan Kuasa Pertambangan maupun berdasarkan ketentuan lain yang berlaku
9	Dokumen AMDAL	selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah KP diterbitkan	Tidak dipersyaratkan atau Ditetapkan dalam Keputusan Bupati Aceh Singkil
10	Perpanjangan KP	selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin, dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi.	Sama
11	Program Pengembangan Masyarakat	mendanai sebesar 1% dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan	Sama
12	tenaga kerja	memprioritaskan tenaga kerja setempat	memprioritaskan tenaga kerja setempat minimal

			60%
13	Kewajiban menunjukkan bukti/kewajiban dalam pemeriksaan	Ada	Ditetapkan dalam Keputusan Bupati Aceh Singkil
14	Tunduk pada peraturan yang berlaku	Ada	Ditetapkan dalam Keputusan Bupati Aceh Singkil

Proses Perizinan yang dikelola oleh KP2TSP terhadap CV Bintang Sumber Rezeki (selanjutnya disebut BSR) adalah perusahaan yang memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk pertambangan Galian C. Proses pemberian izin ini diawali dari permohonan H. Rosman tanggal 16 November 2006 kepada KP2TSP yang melampirkan Surat Rekomendasi dari Camat Gunung Meriah 503/1079/2006 tertanggal 16 November 2006.

Menanggapi permohonan tersebut, maka KP2TSP Seksi Pelayanan melakukan proses pengelolaan dengan sumberdaya yang ada (SDM, Informasi, Kewenangan, Sarana & Prasarana) melakukan komunikasi dengan Pj. Bupati Aceh Singkil (Ir. Hasdaruddin) dan mengabulkan permohonan BSR dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 545/01/SIPD/2006 Tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Kabupaten Aceh Singkil Bupati tanggal 16 November 2006. Setelah SIPD dikeluarkan, maka KP2TSP melakukan disposisi informasi kepada (1) Kepala Dispenda Kabupaten Aceh Singkil, (2) Kepala Dinas Perindag Aceh Singkil, (3) Camat Gunung Meriah. Beberapa fakta yang menarik dianalisa dalam pembahasan ini antara lain:

1. Proses perizinan antara penerimaan surat permohonan BRS dengan (1) Rekomendasi Camat Gunung Meriah, (2) diterima oleh KP2TSP hingga keluarnya SIPD adalah 1 (satu) hari, yaitu pada tanggal 16 November 2006.
2. BSR membayar Iuran Wajib sebesar Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) pertahun, terhitung mulai berlakunya keputusan ini.
3. Iuran Wajib tetap harus dibayar dimuka untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan disetor pada Dispenda Kabupaten Aceh Singkil.
4. Iuran Wajib Tidak Tetap (Iuran Produksi) dibayar berdasarkan hasil produksi pada setiap akhir bulan sebesar 20% dari nilai standar per/M3 dan disetor pada Dispenda Kabupaten Aceh Singkil.
5. Menyampaikan laporan berkala (triwulan) tentang pelaksanaan Izin Pertambangan Daerah kepada Bupati Aceh Singkil.
6. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai berlakunya keputusan ini, melaksanakan pematokan batas-batas wilayah/daerah Izin pertambangan dimaksud.
7. Permohonan perpanjangan SIPD harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Izin dengan disertai bukti-bukti/kewajiban-kewajiban yang telah dipenuhi.
8. Pemegang SIPD harus mengajukan surat-surat bukti/kewajiban yang diminta oleh petugas sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan.
9. Pemegang SIPD harus memperhatikan ketentuan tentang Tata Guna Air dan Pengairan, untuk mencegah penggalan yang mengakibatkan gangguan Tata Guna Air.
10. Mengindahkan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah.

Pengelolaan Perizinan yang dipindahkan menjadi kewenangan Kota Subulussalam Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu membentuk Kota Subulussalam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan Kota Subulussalam diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah, maka terbentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam. PT Bintang Delapan Mineral adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sebagai Pemegang KP Eksplorasi (Nomor: 188.4.5/82/Tahun 2007 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Bintang Delapan Mineral di Kabupaten Aceh Singkil.). Maka proses perizinannya menjadi hak kelola di bawah kewenangan Kota Subulussalam. Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada Pemerintah Kota Subulussalam, maka Bupati Aceh Singkil menyampaikan Surat Bupati Aceh Singkil No.540/928/2008 tanggal 07 Juli 2008 tentang "Pengalihan Administrasi Perusahaan Pertambangan" PT Bintang Delapan Mineral terhadap KP Eksplorasi yang berada di wilayah Pemerintah Kota Subulussalam. Dengan pemberitahuan tersebut, maka proses selanjutnya adalah kewenangan Pemerintah Kota Subulussalam untuk membuat kebijakan terkait izin usaha pertambangan PT Bintang Delapan Mineral.

PENUTUP

Dari uraian diatas, peneliti mendapatkan kesimpulan sementara atas Pembahasan Pengaruh Pada Implementasi dari Kebijakan Desentralisasi Pertambangan di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, yaitu:

1. Implementasi kebijakan yang dikelola oleh Setdakab adalah proses pengelolaan perizinan untuk bahan galian Golongan A dan Golongan B.
2. Implementasi kebijakan yang dikelola oleh KP2TSP adalah proses pengelolaan perizinan untuk bahan galian Golongan C.
3. Implementasi pelimpahan kewenangan pengelolaan izin usaha pertambangan kepada Pemerintah Kota Subulussalam mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4. Dampak dari pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi Kota Subulussalam adalah pengurangan sumberdaya antara lain: aparatur daerah, informasi, kewenangan, sarana dan prasaranan.
5. Berkurangnya personil aparatur daerah dan sarana serta prasarana ke Kota Subulussalam berdampak langsung terhadap pengurangan sumber daya dan aset Kabupaten Aceh Singkil.

Kepada Bupati Aceh Singkil disarankan segera merancang Qanun dinas teknis (eselon II) atau pejabat eselon III khusus menangani bidang pengelolaan izin usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya, agar SOP pengelolaan izin bahan galian golongan A dan B dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, A, (2005). *Strategi Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Edwards III, G.C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

Hikmahanto, (2012). *Kewenangan Izin Pertambangan Diusulkan Kembali Seperti Era Soeharto*. Diakses pada 10 Oktober 2012. <http://finance.detik.com/read/2012/08/09/175245/1987608/4/kewenangan-izin-pertambangan-diusulkan-kembali-seperti-era-soeharto>

Moleong. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nugraha, S. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Badan Penerbit FHUI

Sabardi, A. (2001). *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

Salim, HS. (2004) *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Sigit, S. (2004). *Pertambangan Indonesia, Sepenggal Sejarah Perkembangan*. Jakarta: Yayasan Minergy Informasi Indonesia.

Sulistiyani, TA & Rosidah. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu: Yogyakarta.

Swastha, B. (2000). *Pengantar Bisnis Modern, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, Jakarta : Liberty An introduction to the study of public policy, Duxbury Press.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1967 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Alam
Peneliti selanjutnya hendaknya mempertimbangkan hal ini:

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Alam